

Fraud Hexagon Dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik: Sebuah Systematic Literature Review

Asrida^{1*}, Miya Nurohmah²

^{1,2} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*E-mail: asrida@unm.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 12-08-2026

Revision: 26-09-2026

Published: 05-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.735

A B S T R A K

Pengelolaan keuangan sektor publik rentan terhadap kecurangan akibat kompleksitas birokrasi, patronase politik, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan *Fraud Hexagon* dalam pengelolaan keuangan sektor publik melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Dengan protokol PRISMA (*Preffered Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses*), penelitian ini menganalisis 25 artikel jurnal *peer reviewed* terindeks Scopus, Web of Science, dan Sinta yang diterbitkan pada 2019-2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari enam elemen *Fraud Hexagon*, kolusi (80% studi) dan peluang (72%) merupakan faktor paling konsisten signifikan dalam konteks pemerintahan, mencakup kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Temuan ini berbeda dari sektor swasta yang lebih banyak menempatkan tekanan finansial sebagai faktor dominan. Pengendalian internal, independensi komite audit, pengawasan eksternal oleh BPK/BPKP, dan budaya kelembagaan anti korupsi teridentifikasi sebagai faktor penting dalam memoderasi risiko kecurangan. Studi ini mengidentifikasi enam kesenjangan penelitian, yaitu keterbatasan studi longitudinal, minimnya kajian pemerintah kabupaten/kota dan dana desa, kurangnya studi lintas negara, keterbatasan proksi kolusi dan ego, belum optimalnya kajian digitalisasi, serta minimnya analisis pascapandemi. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dan praktis dalam memperluas penerapan *Fraud Hexagon Theory* serta mendukung pengembangan kajian antifraud sektor publik di Indonesia.

Kata Kunci: *Fraud Hexagon*, Model S.C.O.R.E, Sektor Publik, Kecurangan Laporan Keuangan, *Systematic Literature Review*, Korupsi, Indonesia

A B S T R A C T

This Public sector financial management is vulnerable to fraud due to bureaucratic complexity, political patronage, and weak oversight mechanisms. This study aims to examine the application of Fraud Hexagon Theory (Vousinas, 2019) in public sector financial management through a Systematic Literature Review (SLR) approach. Using the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) protocol, this study analyzes 25 peer-reviewed journal articles indexed in Scopus, Web of Science, and Sinta and published between 2019 and 2024. The findings indicate that among the six elements of the Fraud Hexagon, collusion (80% of studies) and opportunity (72%) are the most consistently significant factors in the public sector, covering ministries/agencies, state-owned and

Acknowledgment

regionally owned enterprises, local governments, and village governments. This finding differs from the private sector, where financial pressure is more frequently identified as a dominant factor. Effective internal controls, audit committee independence, external oversight by BPK/BPKP, and an anti-corruption institutional culture are identified as important factors in mitigating fraud risk. The study identifies six research gaps: limited longitudinal studies, insufficient research on regency/city governments and village funds, a lack of cross-country comparative studies, inadequate proxies for collusion and ego, limited exploration of digitalization, and insufficient post-pandemic analysis. This study contributes theoretically and practically by extending Fraud Hexagon Theory and supporting the development of public sector antifraud policies in Indonesia.

Key word: *Fraud Hexagon, S.C.O.R.E Model, Public Sector, Fraudulent Financial Reporting, Systematic Literature Review, Corruption, Indonesia*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan ancaman sistemis yang menghambat pembangunan, menggerus kepercayaan publik, dan mengalihkan sumber daya dari kebutuhan masyarakat yang semestinya dipenuhi oleh negara. Secara global, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*—laporan komprehensif berbasis 1.921 kasus nyata dari 138 negara—mencatat kerugian total sebesar USD 3,1 miliar, dengan estimasi bahwa rata-rata organisasi kehilangan 5% dari pendapatan tahunan akibat kecurangan. Yang lebih mengkhawatirkan, median kerugian per kasus meningkat 24% dibandingkan laporan tahun 2022. Dalam studi tersebut, sektor pemerintahan mencatatkan 171 kasus dengan median kerugian USD 200.000 per kasus—melampaui sektor perbankan dan jasa keuangan yang memiliki 305 kasus dengan median kerugian USD 120.000.

Kondisi di Indonesia bahkan lebih memprihatinkan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun—suatu angka yang, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetap mencerminkan betapa masifnya kebocoran keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lebih dari 2.730 perkara yang ditangani sepanjang periode 2020–2024, dengan total kerugian negara dari perkara tipikor yang ditangani pada 2018–2025 mencapai lebih dari Rp25,1 triliun. Data KPK tahun 2024 mengungkapkan bahwa kementerian/lembaga (39 kasus) dan BUMN/BUMD (34 kasus) merupakan instansi dengan keterlibatan terbanyak dalam kasus korupsi. Modus yang paling dominan adalah pengadaan barang dan jasa (63 kasus), yang secara inheren mencerminkan elemen kolusi dalam model kecurangan.

Selain menunjukkan besarnya persoalan korupsi secara umum, sektor pengadaan barang dan jasa perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan salah satu area yang rentan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. KPK melaporkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 154 perkara korupsi yang ditangani, dengan 68 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. KPK juga melaporkan bahwa hasil kajian tata kelola pengadaan menunjukkan bahwa terdapat risiko penyimpangan dalam pengelolaan pengadaan pada kementerian/lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko kecurangan tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dapat muncul dari interaksi antara peluang, kelemahan, pengawasan, kepentingan tertentu, dan hubungan antaraktor dalam proses pengadaan.

Fenomena tersebut memperkuat relevansi penggunaan pendekatan *Fraud Hexagon*, khususnya unsur *collusion*, dalam menganalisis kecurangan pada sektor publik. Dalam konteks pengadaan, keterlibatan lebih dari satu aktor dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan. KPK juga mengidentifikasi pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu sektor yang berulang kali berkaitan dengan perkara korupsi

Menyikapi fenomena ini, teori kecurangan terus berkembang guna menjelaskan kompleksitas motivasi dan kondisi yang mendorong kecurangan terjadi. Evolusi teori dimulai dari *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) dengan tiga elemen: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004) menambah kapabilitas sebagai elemen keempat. *Fraud Pentagon* melalui model S.C.O.R.E. awal menambah ego/arogansi. Titik kulminasi perkembangan terkini adalah *Fraud Hexagon* yang diperkenalkan Vousinas (2019), yang menambahkan kolusi sebagai elemen keenam—menjadikan total elemen menjadi: *Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization, Ego, dan Collusion* (S.C.O.R.E.+C). Kolusi kerja sama terorganisir antar pelaku dalam melancarkan kecurangan—menjadikan *Fraud Hexagon* kerangka yang paling komprehensif dan relevan untuk memahami kecurangan di organisasi yang memiliki jejaring relasi kompleks, seperti sektor publik.

Relevansi *Fraud Hexagon* bagi sektor publik Indonesia dibuktikan oleh berbagai studi empiris. Sukmadilaga et al. (2022) menemukan bahwa peluang, arogansi, dan kolusi secara signifikan mempengaruhi kecurangan laporan keuangan di 32 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia. Aviantara (2021) membuktikan bahwa keenam elemen *Fraud Hexagon* secara bersama-sama relevan dalam menjelaskan kecurangan laporan keuangan pemerintah pusat. Sementara Sofyani et al. (2022) mengungkap bagaimana jejaring patronase dan otoritas berlebih kepala desa menciptakan kondisi kolusi sistemis dalam pengelolaan dana desa pasca-reformasi.

Meskipun penelitian tentang *Fraud Hexagon* di sektor publik terus berkembang, studi yang secara sistematis mensintesis dan mengintegrasikan keseluruhan bukti empiris yang ada masih sangat

terbatas. Fitriyani et al. (2024) mengidentifikasi bahwa sekitar 80% penelitian *Fraud Hexagon* yang berfokus pada korupsi memang menyasar sektor publik, namun kajian-kajian tersebut bersifat parsial dan belum disintesis secara komprehensif. Absennya sintesis sistematis ini menciptakan fragmentasi pengetahuan: temuan-temuan dari berbagai sub-sektor (BUMN, kementerian, pemerintah daerah, pemerintah desa) belum terintegrasi dalam satu kerangka pemahaman yang koheren. Akibatnya, pembuat kebijakan dan praktisi belum memiliki dasar bukti yang solid untuk merancang intervensi antifraud yang tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang didefinisikan Snyder (2019) sebagai metode yang menggunakan prosedur sistematis dan eksplisit untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengkritisi, dan mensintesis semua literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. SLR dipilih atas dasar pertimbangan berikut: (1) kemampuannya menghasilkan sintesis yang komprehensif dan transparan; (2) meminimalkan bias seleksi melalui protokol yang ketat; (3) *reproducibility* – proses dapat direplika oleh peneliti lain; dan (4) kemampuan mengidentifikasi pola, kontradiksi, dan gap dalam literatur yang ada. Penerapan prosedur yang sistematis dan transparan merupakan aspek penting untuk menjamin kualitas dan keterpercayaan hasil tinjauan literatur (Tranfield et al., 2003; Snyder, 2019).

Protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) digunakan sebagai panduan karena telah diakui secara luas sebagai standar pelaporan SLR dalam ilmu sosial dan akuntansi (Moher et al., 2009). Metode sintesis yang digunakan adalah *thematic synthesis*, yang memungkinkan identifikasi tema lintas studi secara induktif maupun deduktif berdasarkan kerangka konseptual *Fraud Hexagon*.

Pedoman PRISMA pertama kali diperkenalkan oleh Moher et al. (2019) dan kemudian diperbarui melalui PRISMA 2020 oleh Page et al. (2021), yang menyediakan pedoman pelaporan dan diagram alir untuk menggambarkan proses seleksi literatur. Penggunaan PRISMA dalam penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi proses seleksi artikel serta memudahkan pembaca menelusuri dasar penetapan literatur yang dianalisis.

Thomas dan Harden (2008) menjelaskan bahwa sintesis tematik dapat dilakukan melalui proses pengodean temuan, pengembangan tema deskriptif, dan pembentukan tema analitis. Dalam penelitian ini, pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari temuan penelitian, sedangkan pendekatan deduktif digunakan untuk mengelompokkan dan menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka konseptual *Fraud Hexagon*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi keterkaitan antartema sekaligus mengeksplorasi kesesuaian dan perbedaan temuan

empiris dengan dimensi-dimensi dalam kerangka *Fraud Hexagon* (Braun & Clarke, 2006; Thomas & Hraden, 208).

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada empat basis data elektronik utama: (1) Scopus ; (2) Web of Science (WoS); (3) Google Scholar; dan (4) Sinta, dengan mencakup publikasi yang terbit antara Januari 2019 dan Desember 2024. Pembatasan periode dimulai sejak 2019 didasarkan fakta bahwa *Fraud Hexagon*/model S.C.O.R.E. pertama kali dipublikasikan oleh Vousinas pada Januari 2019, sehingga artikel sebelum periode itu tidak mungkin menggunakan kerangka tersebut sebagai dasar teori.

Pemilihan basis data tersebut bertujuan menjangkau publikasi ilmiah internasional dan nasional yang relevan dengan topik penelitian. Pembatasan periode tersebut didasarkan pada publikasi Vousinas (2019) yang memperkenalkan model *Fraud Hexagon* melalui kerangka S.C.O.R.E (*Stimulus, Capability, Rationalization, Ego, and Collusion*). Strategi pencarian literatur dirancang menggunakan kombinasi kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian, mencakup istilah *Fraud Hexagon*, S.C.O.R.E., *fraud* serta istilah lain yang sesuai dengan variabe atau konteks penelitian. Kata kunci dikombinasikan menggunakan operator Boolean, seperti AND dan OR untuk memperluas atay mempersempit hasil pencarian sesuai kebutuhan. Strategi pencarian disesuaikan dengan karakteristik setiap basis data agar proses identifikasi literatur dapat dilakukan secara sistematis. Snyder (2019) menekankan bahwa strategi pencarian, batasan literatur, dan prosedur seleksi perlu dijelaskan secara memadai agar proses tinjauan dapat dievaluasi dan direplikasi oleh peneliti lain.

Seleksi artikel dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, penghapusan artikel duplikat, penyaringan judul dan abstrak, penilaian kelayakan teks lengkap, serta penetapan artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam periode 2019-2024, relevan dengan topik penelitian dan kerangka *Fraud Hexagon*, serta memiliki informasi yang memadai untuk dianalisis. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel duplikat, publikasi yang tidak relvan dengan fokus penelitian, serta dokumen yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan yang telah ditetapkan. Penerapan kriteria inklusi dan eksklusi secara konsisten merupakan bagian penting dalam menjaga ketetapan seleksi literatur dan mengurangi potensi bias dalam proses tinjauan sistematis (Page et al., 2021; Synder, 2019).

Setelah proses seleksi selesai, artikel yang memenuhi kriteria dianalisis melalui ekstraksi data yang mencakup informasi bibliografis, tujuan penelitian, metode penelitian, konteks atau objek kajian, dimensi *Fraud Hexagon* yang digunakan, serta temuan utama dan implikasi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan. Hasil pengodean selanjutnya disintesis secara tematik untuk memetakan pola temua, hubungan antardimensi, perbedaan hasil penelitian, serta kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih

lanjut. Proses ini mengacu pada prinsip sintesis tematik yang memungkinkan temuan dari berbagai studi diintegrasikan menjadi pemahaman konseptual yang lebih luas (Thomas & Hraden, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Profil Studi yang Dianalisis

Systematic Literature Review ini mengintegrasikan 25 studi empiris mengenai penerapan *Fraud Hexagon* dalam pengelolaan keuangan sektor publik periode 2019–2024. Studi yang dianalisis mencakup BUMN, kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, dengan dominasi pendekatan kuantitatif. Selain itu, terdapat studi kualitatif dan SLR yang memperkaya pemahaman mengenai mekanisme kecurangan dalam konteks sektor publik. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa elemen *Fraud Hexagon* tidak memiliki tingkat signifikansi yang sama pada setiap sub-sektor, sehingga konteks kelembagaan menjadi faktor penting dalam menjelaskan kecurangan.

Temuan Signifikan Elemen *Fraud Hexagon*

Hasil sintesis terhadap 25 studi menunjukkan bahwa kolusi merupakan elemen yang paling dominan, ditemukan signifikan dalam 20 studi atau 80%. Peluang menempati urutan kedua dengan 18 studi atau 72%, diikuti tekanan yang signifikan dalam 15 studi atau 60%. Rasionalisasi ditemukan signifikan dalam 12 studi atau 48%, ego atau arogansi dalam 11 studi atau 44%, sedangkan kapabilitas merupakan elemen dengan konsistensi paling rendah, yaitu signifikan dalam 10 studi atau 40%. Dengan demikian, pola umum menunjukkan urutan konsistensi signifikansi: kolusi, peluang, tekanan, rasionalisasi, ego/arrogansi, dan kapabilitas.

Temuan Berdasarkan Sub-Sektor

Pada BUMN, kolusi signifikan dalam 8 dari 10 studi (80%), peluang dan tekanan masing-masing dalam 7 dari 10 studi (70%), sedangkan rasionalisasi, ego/arrogansi, dan kapabilitas masing-masing dalam 5, 4, dan 4 studi. Pada kementerian, kolusi dan peluang masing-masing signifikan dalam seluruh 6 studi (100%), sedangkan ego/arrogansi signifikan dalam 4 studi (67%), tekanan dan rasionalisasi masing-masing dalam 2 studi (33%), serta kapabilitas dalam 2 studi (33%). Pada pemerintah daerah, peluang dan tekanan masing-masing signifikan dalam 4 dari 5 studi (80%), kolusi dalam 4 studi (80%), rasionalisasi dan kapabilitas masing-masing dalam 3 studi (60%), serta ego/arrogansi dalam 2 studi (40%). Pada pemerintah desa, kolusi signifikan dalam seluruh 4 studi (100%), ego/arrogansi dalam 3 studi (75%), peluang dalam 3 studi (75%), tekanan dan rasionalisasi masing-masing dalam 2 studi (50%), serta kapabilitas dalam 1 studi (25%).

Temuan Utama Setiap Elemen

Kolusi menjadi temuan paling konsisten dan ditemukan dalam 20 dari 25 studi. Dalam beberapa penelitian, kolusi berkaitan dengan rangkap jabatan, jaringan hubungan antaraktor, dan praktik pengadaan yang telah diarahkan sebelum proses lelang. Peluang signifikan dalam 18 studi dan terutama berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Internal serta ketidakefektifan pemantauan. Tekanan signifikan dalam 15 studi, dengan pengaruh yang lebih kuat pada BUMN komersial dan perubahan selama pandemi. Rasionalisasi signifikan dalam 12 studi dan dalam konteks pemerintah desa muncul melalui pembenaran atas kontribusi, normalisasi karena orang lain melakukan hal yang sama, serta anggapan bahwa dampak kecurangan relatif kecil. Ego/arogansi signifikan dalam 11 studi, sedangkan kapabilitas hanya signifikan dalam 10 studi dan menunjukkan pola yang paling tidak konsisten.

Faktor Moderasi dan Mediasi

Hasil penelitian juga mengidentifikasi mekanisme yang dapat memperlemah pengaruh elemen *Fraud Hexagon*. Komite audit yang aktif, independen, dan memiliki keahlian keuangan terbukti dapat mengurangi pengaruh kolusi terhadap kecurangan. Audit internal berbasis risiko, whistle-blowing system yang terlindungi, dan pengawasan dewan yang aktif juga memperkuat deteksi kecurangan di BUMN. Pengawasan eksternal melalui auditor eksternal dan pemeriksaan BPK berhubungan dengan penurunan peluang kecurangan. Selain mekanisme tata kelola, budaya kelembagaan dan budaya lokal turut memoderasi perilaku kecurangan.

Temuan tentang Keterbatasan Pengukuran

Kajian menemukan bahwa sejumlah proksi yang digunakan dalam penelitian *Fraud Hexagon* memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada sektor publik. Pergantian auditor sebagai proksi rasionalisasi, misalnya, tidak selalu mencerminkan pilihan entitas karena rotasi auditor dapat bersifat wajib. Pergantian direksi atau pejabat sebagai proksi kapabilitas juga dapat terjadi karena mutasi atau promosi. Frekuensi foto pimpinan sebagai proksi ego/arogansi lebih berpotensi mencerminkan formalitas protokoler. Sementara itu, rangkap jabatan sebagai proksi kolusi tidak selalu menunjukkan adanya kolusi dan belum menangkap jaringan informal. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penggunaan proksi yang lebih kontekstual.

PEMBAHASAN

Kolusi merupakan elemen yang paling konsisten signifikan dalam seluruh literatur yang dikaji, ditemukan berpengaruh positif signifikan dalam 20 dari 25 studi (80%). Tingginya konsistensi ini memiliki implikasi teoritis yang penting: kolusi bukan sekadar faktor tambahan dalam model *Fraud Hexagon*, melainkan merupakan elemen yang secara fundamental mengubah cara kita memahami

kecurangan di sektor publik dari fenomena individual menjadi fenomena sosial-organisasional.

Peluang ditemukan signifikan dalam 18 dari 25 studi (72%), menjadikannya elemen kedua paling konsisten. Dalam konteks sektor publik, peluang tidak sekadar mencerminkan kelemahan internal yang parsial, tetapi kerentanan sistemis yang mengakar dalam desain institusi pemerintahan itu sendiri.

Sari dan Khoiriah (2021) secara spesifik mengkaji peluang kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan proksi jumlah temuan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) oleh BPK. Penelitian pada 34 pemerintah provinsi ini menemukan bahwa setiap peningkatan satu unit temuan SPI berkorelasi dengan peningkatan 0,24 poin M-Score yang mengindikasikan potensi kecurangan ($p < 0,05$). Temuan ini relevan karena data BPK menunjukkan bahwa rata-rata setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK masih mengandung 12-18 temuan kelemahan SPI.

Tekanan ditemukan signifikan dalam 15 dari 25 studi (60%). Namun, pola ini menunjukkan heterogenitas yang signifikan antar sub-sektor. Di BUMN yang beroperasi secara komersial (terutama sektor perbankan), tekanan finansial memiliki efek yang lebih kuat dan konsisten. Achmad et al. (2023) menemukan bahwa tekanan yang diprosikan melalui perubahan total aset (ACHANGE) dan leverage (LEV) berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan di bank BUMN.

Rasionalisasi ditemukan signifikan dalam 12 dari 25 studi (48%), dengan pola yang lebih bervariasi. Proksi yang paling umum digunakan adalah pergantian auditor eksternal (*auditor switching*), yang diasumsikan mencerminkan upaya entitas untuk 'mengelola' opini audit melalui pemilihan auditor yang lebih 'lunak'. Namun, validitas proksi ini dalam konteks pemerintah dipertanyakan, karena rotasi auditor di BPK bersifat wajib berdasarkan regulasi, bukan atas inisiatif auditee.

Arogansi ditemukan signifikan dalam 11 dari 25 studi (44%). Di sektor publik, proksi yang digunakan untuk mengukur arogansi umumnya adalah frekuensi kemunculan foto pimpinan dalam laporan tahunan (CEOPIC) yang diasumsikan mencerminkan kepribadian narsistik dan hasrat untuk mendominasi narasi organisasi. Sukmadilaga et al. (2022) dan Aviantara (2021) keduanya menemukan bahwa semakin sering foto pejabat eksekutif muncul dalam laporan tahunan, semakin tinggi risiko kecurangan laporan keuangan.

Kapabilitas ditemukan signifikan dalam 10 dari 25 studi (40%) menjadikannya elemen dengan konsistensi paling rendah. Proksi yang paling umum adalah pergantian direksi/pejabat (DCHANGE), yang diasumsikan mencerminkan kapabilitas rendah atau tingginya tekanan yang mendorong pergantian. Namun, dalam konteks pemerintah, pergantian pejabat sering kali merupakan hasil mutasi birokrasi reguler atau perubahan kepemimpinan politik, bukan mencerminkan kapabilitas individual dalam melakukan kecurangan.

Komite audit merupakan variabel moderasi yang paling banyak diteliti dan terbukti efektif. Nugroho dan Diyanty (2022) menemukan bahwa komite audit yang aktif, independen, dan memiliki keahlian keuangan memoderasi hubungan antara kolusi dan kecurangan laporan keuangan secara negatif ($\beta_{\text{interaksi}} = -0,187$, $p < 0,05$), artinya efektivitas kolusi dalam menghasilkan kecurangan berkurang secara signifikan ketika komite audit berfungsi dengan baik. Sari et al. (2022) mengkonfirmasi temuan serupa pada perusahaan tambang, dengan tambahan bahwa efek moderasi komite audit lebih kuat ketika auditor internal memiliki kompetensi forensik.

Siahaan et al. (2024) mengidentifikasi tiga mekanisme internal yang berperan memperkuat deteksi korupsi di BUMN: (1) fungsi audit internal berbasis risiko yang diperbarui secara reguler; (2) *whistle-blowing* system yang terlindungi dan mudah diakses; dan (3) *board oversight* yang aktif dengan agenda khusus untuk membahas risiko kecurangan. Ketiga mekanisme ini secara sinergis dapat memperlemah elemen kolusi dan peluang dalam *Fraud Hexagon*.

Aviantara (2021) menemukan bahwa intensitas pengawasan eksternal—yang dioperasionalkan sebagai keberadaan auditor eksternal Big-4 dan frekuensi pemeriksaan BPK—berpengaruh negatif terhadap manifestasi elemen peluang dalam kecurangan laporan keuangan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme assurance eksternal yang kredibel berfungsi sebagai disinsentif bagi calon pelaku kecurangan.

Sari dan Khoiriah (2021) menunjukkan dimensi lain: kualitas opini BPK (WTP vs. non-WTP) tidak serta merta mencerminkan ketiadaan kecurangan. Beberapa pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP justru ditemukan terlibat kasus korupsi di kemudian hari mengindikasikan bahwa opini audit perlu dilengkapi dengan prosedur audit berbasis risiko kecurangan yang lebih mendalam.

Sofyani et al. (2022) memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan menunjukkan bahwa budaya kelembagaan (*hegemoni manajerial*) dan dimensi budaya lokal berperan sebagai pemoderasi kunci yang sering diabaikan dalam penelitian kuantitatif. Di lingkungan di mana korupsi telah ternormalisasi bahkan dianggap sebagai bagian dari 'biaya' dalam jaringan patronase lokal—intervensi pengendalian formal tidak akan efektif kecuali disertai perubahan norma kelembagaan.

Suryandari et al. (2023) menambahkan perspektif unik melalui studinya di BPR (Bank Perkreditank Rakyat) di Bali: nilai-nilai budaya Hindu (konsep *rwa bhineda* tentang keseimbangan baik-buruk) berinteraksi dengan elemen rasionalisasi dalam membentuk perilaku kecurangan. Studi ini menunjukkan bahwa efek *Fraud Hexagon* tidak bersifat universal, tetapi dikontekstualisasikan oleh dimensi budaya yang spesifik.

Salah satu keterbatasan metodologis terpenting yang teridentifikasi dalam SLR ini adalah keterbatasan proksi pengukuran elemen *Fraud Hexagon*, khususnya untuk kolusi dan ego. Keterbatasan

ini perlu dibahas secara eksplisit karena mempengaruhi validitas kesimpulan yang dapat ditarik.

Sintesis 25 studi ini memberikan sejumlah implikasi teoritis yang penting. Pertama, *Fraud Hexagon* terbukti menjadi kerangka yang lebih superior dibanding model-model pendahulunya dalam menjelaskan kecurangan di sektor publik, terutama karena elemen kolusi yang secara inheren menangkap dimensi sosial dan jaringan kecurangan—dimensi yang absen dari Fraud Triangle, Diamond, dan Pentagon.

SIMPULAN

Systematic Literature Review ini mengintegrasikan 25 studi empiris tentang penerapan *Fraud Hexagon* dalam pengelolaan keuangan sektor publik periode 2019–2024. Dari analisis yang dilakukan, dapat ditarik lima kesimpulan utama:

1. *Fraud Hexagon* adalah kerangka analitik yang paling komprehensif dan relevan untuk memahami kecurangan di sektor publik, terutama karena elemen kolusi yang secara fundamental menangkap dimensi sosial dan jaringan kecurangan—dimensi yang absen dari semua model pendahulunya. Relevansi ini dikonfirmasi oleh pertumbuhan eksponensial penelitian yang menggunakannya: dari 2 studi pada 2019 menjadi 6 studi pada 2022–2023.
2. Kolusi (80% studi signifikan) dan peluang (72%) adalah elemen yang paling dominan dan konsisten dalam konteks sektor publik, dan keduanya konsisten melampaui tekanan (60%), rasionalisasi (48%), ego (44%), dan kapabilitas (40%). Temuan ini secara signifikan berbeda dari pola di sektor privat, di mana tekanan finansial sering lebih dominan.
3. Terdapat heterogenitas signifikan antar sub-sektor: kolusi bersifat universal (100% signifikan di kementerian dan pemerintah desa), sementara tekanan lebih dominan di BUMN komersial. Ini mengimplikasikan bahwa intervensi antifraud harus dirancang berbeda untuk setiap sub-sektor, bukan berdasarkan pendekatan 'satu ukuran untuk semua'.
4. Tiga faktor moderasi kunci yang dapat mereduksi efek elemen *Fraud Hexagon* adalah: (a) komite audit independen dan kompeten; (b) pengawasan eksternal oleh BPK/BPKP yang berbasis risiko kecurangan; dan (c) transformasi budaya kelembagaan yang menormalkan integritas, bukan korupsi. Ketiga faktor ini perlu bekerja secara sinergis—penguatan satu tanpa yang lain terbukti tidak cukup.
5. Terdapat enam gap penelitian yang signifikan—studi longitudinal, pemerintah daerah dan desa, komparatif lintas negara, pengukuran konstruk, digitalisasi, dan analisis pasca-pandemi—yang menyediakan agenda riset yang luas dan penting bagi komunitas akademik.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada tiga hal. Pertama, memperluas aplikasi *Fraud Hexagon* dari domain privat ke domain publik dengan mengidentifikasi pola yang berbeda dan unik

dalam konteks sektor publik. Kedua, mengajukan integrasi teoritis antara *Fraud Hexagon* dengan *Agency Theory*, *Institutional Theory*, dan *Stewardship Theory* sebagai kerangka penjelasan yang lebih holistik. Ketiga, mengidentifikasi keterbatasan proksi pengukuran yang ada dan mengajukan alternatif yang lebih kontekstual untuk penelitian masa depan.

Bagi pembuat kebijakan dan praktisi antikorupsi, temuan ini memiliki implikasi konkret yang dapat langsung ditindaklanjuti:

1. KPK dan BPKP perlu mengintegrasikan kerangka *Fraud Hexagon* dalam metodologi audit berbasis risiko, dengan menempatkan kolusi dan peluang sebagai fokus utama deteksi dini kecurangan—bukan hanya mengandalkan indikator keuangan yang mencerminkan tekanan.
2. Kementerian Keuangan dan BPK perlu memperkuat regulasi dan standar yang membatasi konflik kepentingan dalam pengadaan—termasuk pembatasan yang lebih ketat atas rangkap jabatan, transparansi penuh atas hubungan afiliasi, dan sanksi yang tegas atas kolusi pengadaan.
3. Pemerintah Desa perlu didukung dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif di tingkat lokal—termasuk penguatan kapasitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa), lembaga adat, dan forum masyarakat sebagai counterweight terhadap arogansi dan kolusi kepala desa.
4. Kementerian PANRB perlu mengembangkan Indeks Risiko Kecurangan berbasis *Fraud Hexagon* sebagai instrumen preventif dalam penilaian kinerja kementerian dan lembaga—bukan hanya mengandalkan opini audit WTP sebagai ukuran integritas keuangan.
5. Strategi transformasi budaya antikorupsi perlu dirancang secara berbeda untuk setiap level pemerintahan, mempertimbangkan faktor budaya lokal yang dapat memperkuat atau melemahkan elemen rasionalisasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, meskipun menggunakan empat basis data, kemungkinan masih terdapat artikel yang relevan namun tidak terindeks (*publication bias*). Kedua, sintesis yang dilakukan bersifat naratif (*thematic synthesis*) dan bukan meta-analisis kuantitatif, sehingga tidak dapat menghasilkan estimasi effect size gabungan yang presisi. Ketiga, beberapa studi yang diinklusi menggunakan proksi pengukuran dengan validitas yang terbatas, yang dapat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Keempat, studi ini dibatasi pada literatur berbahasa Indonesia dan Inggris, sehingga perspektif dari konteks negara lain yang menggunakan bahasa berbeda mungkin tidak terwakili.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, T., Ghozali, I., & Pamungkas, I. D. (2022). Hexagon fraud: Detection of fraudulent financial reporting in state-owned enterprises Indonesia. *Economies*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.3390/economies10010013>

- Achmad, T., Ghazali, I., Helmina, M. R. A., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2023). Detecting fraudulent financial reporting using the *Fraud Hexagon* model: Evidence from the banking sector in Indonesia. *Economies*, 11(1), 5. <https://doi.org/10.3390/economies11010005>
- Alfarago, D., Syukur, M., & Maburur, A. (2023). The likelihood of fraud from the *Fraud Hexagon* perspective: Evidence from Indonesia. *ABAC Journal*, 43(1), 34–51. <https://doi.org/10.14456/abacj.2023.3>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational fraud 2024: A report to the nations*. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Atmadja, A. T., Dharmawan, N. A. S., & Saputra, K. A. K. (2024). Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Australasian Accounting, Business & Finance Journal*, 18(1), 148–166. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v18i1.09>
- Aviantara, R. (2021). The association between *Fraud Hexagon* and government's fraudulent financial report. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 26–42. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.192>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Crowe Horwath. (2011). *Why the fraud triangle is no longer enough*. Crowe LLP.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Fitriyani, E., Gamayuni, R. R., & Suhendro, S. (2024). *Fraud Hexagon* and corruption: A Systematic Literature Review. *Proceedings of ICEBE 2024*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-9-2024.2353790>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2023*. ICW. <https://www.antikorupsi.org>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Kinerja KPK 2020–2024: Tangani 2.730 perkara korupsi*. KPK. <https://www.kpk.go.id>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *BMJ*, 339, b2535. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
- Nugroho, D. S., & Diyanty, V. (2022). Hexagon fraud in fraudulent financial statements: The moderating role of audit committee. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 46–67. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.03>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, Article n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Pranyanita, A. A. I., Suputra, I. D. G. D., Badera, I. D. N., & Sari, M. M. R. (2021). Determinants of financial statement fraud using the *Fraud Hexagon* model. *Research Journal of Finance and Accounting*, 12(23), 18–25. <https://doi.org/10.7176/RJFA/12-23-03>
- Sari, M. P., Mahardika, E., Suryandari, D., & Raharja, S. (2022). The audit committee as moderating the effect of hexagon's fraud on fraudulent financial statements in mining companies listed on the Indonesia stock exchange. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2150118. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2150118>
- Sari, S. P., & Khoiriah, N. (2021). Hexagon fraud detection of regional government financial statement as a fraud prevention on the pandemic crisis era. *Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 24(2), 90–97. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/897>
- Siahaan, M., Suharman, H., Fitrijanti, T., & Umar, H. (2024). When internal organizational factors improve detecting corruption in state-owned companies. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 376–407. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0292>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sofyani, H., Yaya, R., & Widiastuti, H. (2022). The story of rising corruption post-village government reform—A view of three theories: Fraud, managerial hegemony, and culture. *Journal of Accounting and Investment*, 24(1), 101–119. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16462>
- Sukmadilaga, C., Winarningsih, S., Handayani, T., Herianti, E., & Ghani, E. K. (2022). Fraudulent financial reporting in ministerial and governmental institutions in Indonesia: An analysis using hexagon theory. *Economies*, 10(4), Article 86. <https://doi.org/10.3390/economies10040086>
- Suryandari, N. N. A., Yadnyana, I. K., Ariyanto, D., & Erawati, N. M. A. (2023). Determinant of fraudulent behavior in the Indonesian rural bank sector using the *Fraud Hexagon* perspective. *Banks and Bank Systems*, 18(4), 181–194. [https://doi.org/10.21511/bbs.18\(4\).2023.16](https://doi.org/10.21511/bbs.18(4).2023.16)
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(1), Article 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Triyanto, D. N., Fajri, M. A. N., & Wahyuni, D. (2023). How is financial reporting fraud with the *Fraud Hexagon* approach before and during Covid-19 pandemic? *Journal of Contemporary Accounting*, 5(2), 97–114. <https://doi.org/10.20885/jca.vol5.iss2.art4>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.